

USAHA-USAHA REUNIFIKASI SEMENANJUNG KOREA: MASALAH DAN PROSPEKNYA

Endi RUKMO*

Pembagian Korea pada akhir Perang Dunia II sebenarnya tidak dikehendaki oleh bangsa Korea, tetapi mereka terpaksa menerima kenyataan itu. Sejak itu bangsa Korea terpecah menjadi dua bangsa yang masing-masing berkembang ke arah yang berlainan, dan sejak itu pula bangsa Korea dilibatkan dalam suatu persengketaan global, yaitu persengketaan antara dua kutub yang masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan adanya masalah Korea itu mau tidak mau kawasan Asia-Pasifik sampai saat ini belum dapat melepaskan diri dari ancaman perang yang kemungkinan dapat menjurus kepada suatu perang nuklir, karena masing-masing pihak yang terlibat di dalam persengketaan itu memang melakukan persiapan terus ke arah itu.

Penyatuan kembali bangsa Korea itu kiranya sulit dicapai karena negara-negara besar itu memandang Semenanjung Korea sebagai suatu lokasi yang sangat strategis sehingga mereka masing-masing memandang penting untuk tetap menguasainya atau sedikitnya menanamkan pengaruhnya di situ demi kepentingan global masing-masing.

Untuk mengetahui lebih mendalam masalah pembagian Semenanjung Korea itu dan usaha-usaha pemecahan yang telah dan sedang ditempuh oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam masalah itu, tulisan ini akan mencoba memberikan suatu gambaran mengenai latar belakang pembagian Semenanjung Korea itu, usaha-usaha penyatuan kembali yang telah ditempuh oleh baik pihak Korea Selatan maupun pihak Korea Utara sampai dasawarsa tahun 1980-an ini dan prospek penyelesaiannya.

LETAK SEMENANJUNG KOREA YANG SANGAT STRATEGIS

Secara geostrategis letak Semenanjung Korea itu membuat negara-negara di sekitarnya tertarik untuk menguasainya. Sejak berabad-abad yang lalu semenanjung itu menjadi obyek perebutan dan persengketaan di antara negara-negara besar seperti Cina, Jepang dan Rusia/Uni Soviet (sekarang). Mereka masing-masing melihat betapa vital Semenanjung Korea itu. Misalnya oleh Jepang Semenanjung Korea itu dianggap sebagai "a dagger pointed at the heart of Japan," dan oleh Cina dianggap sebagai "a hammer ready to strike at the head of China," atau "a lip to protect China's teeth."¹ Sementara itu Rusia atau Uni Soviet (sekarang) rupanya sejak dahulu sudah tertarik untuk menguasai semenanjung itu terutama untuk kepentingan angkatan lautnya, karena merupakan pintu ke luar ke Samudra Pasifik.

AWAL PEMBAGIAN SEMENANJUNG KOREA

Usul pembagian Semenanjung Korea itu terjadi untuk pertama kalinya pada bulan Juni 1593, yaitu satu tahun setelah Jepang di bawah Toyotomi Hideyoshi menyerbu Korea, yang pada waktu itu dikuasai oleh Dinasti Ming. Toyotomi mengusulkan agar empat propinsi Korea di sebelah utara tetap dikuasai oleh Raja Korea yang didukung oleh Cina, dan empat propinsi di sebelah selatan agar diberikan kepada Jepang. Namun perundingan antara pihak Cina dan Jepang rupanya menemui kegagalan dan perundingan itu terhenti karena Toyotomi meninggal tahun 1598.

Usul pembagian ini rupanya muncul kembali 300 tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 22 Juli 1894 ketika Inggris sebagai penengah mengusulkan kepada pihak Cina dan Jepang yang sedang berperang memperebutkan semenanjung itu agar membagi dua saja wilayah yang dipersengketakan itu. Diperkirakan usul pembagian Semenanjung Korea oleh Inggris itu hampir sama dengan pembagian sekarang ini, yaitu sekitar garis paralel 38 derajat. Pihak Cina pada waktu itu menerima usul itu dengan syarat bahwa Seoul sebagai ibukota Korea dimasukkan ke dalam daerah yang dikuasainya. Tetapi syarat itu ditolak oleh Jepang, dengan alasan bahwa kemenangan perang sebenarnya sudah di tangan Jepang. Dan memang pada tahun 1895 pasukan Jepang dengan mudah dapat mengalahkan Cina, sehingga berakhirilah pengaruh Cina di Korea bagian selatan itu.

Rupanya Kerajaan Korea yang tetap menguasai empat propinsi bagian utara kemudian mencari dukungan Rusia untuk menghadapi Jepang dengan

¹Hak Joon Kim, *The Unification Policy of South and North Korea - A Comparative Study*

memindahkan Kedutaan Rusia ke Seoul. Hal itu bertentangan dengan usul Jepang, sehingga Jepang mengadakan perundingan mengenai pembagian Korea itu dengan Rusia (1896), tetapi tanggapan Rusia mengenai usul Jepang itu sangat negatif, karena pihak Rusia pun ingin menguasai seluruh Semenanjung Korea. Sikap bermusuhan antara Rusia dan Jepang itu berakhir dengan pecahnya perang antara keduanya pada bulan Pebruari 1904, di mana pada akhirnya Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan mendesaknya sampai ke perbatasan di sebelah utara. Dengan penengahan Amerika Serikat Perjanjian Portsmouth ditandatangani pada tanggal 5 September 1905, di mana Rusia dipaksa menerima kekalahannya dan mengakui Jepang sebagai penguasa di Korea. Dengan perjanjian itulah Jepang menjadikan Korea daerah protektoratnya dan secara resmi pada bulan Agustus 1910 Jepang mengumumkan pendudukan atas Korea. Dengan demikian Korea menjadi koloni Jepang hingga akhir Perang Dunia II tahun 1945.¹

GARIS PARALEL 38° MENJADI BATAS PERMANEN

Menjelang Penyerahan Jepang bulan Agustus 1945, untuk pertama kalinya Amerika Serikat mengusulkan pembagian wilayah Semenanjung Korea kepada Uni Soviet dengan maksud untuk mempermudah penyerahan pasukan Jepang di wilayah itu. Penyerahan pasukan di wilayah sebelah utara garis paralel 38° akan diterima oleh Uni Soviet dan di sebelah selatan garis itu oleh Amerika Serikat. Tetapi kesempatan itu rupanya digunakan oleh Uni Soviet untuk memperkuat pengaruh dan pendudukannya atas wilayah bagian utara garis itu. Menjelang akhir tahun 1945 penguasa Uni Soviet memutuskan garis paralel 38° menjadi batas tetap antara wilayah Korea Utara dan Selatan, dan semua kegiatan menyeberangi batas tersebut ditutup. Bersamaan dengan keputusan itu kelompok orang-orang Korea yang dalam masa pendudukan Jepang lari ke Manchuria, Siberia dan Cina kembali ke Korea Utara dan mengadakan kerja sama dengan penguasa Uni Soviet untuk membentuk suatu pemerintah komunis.

Sejak penyerahan pasukan Jepang itu, Uni Soviet tidak hanya menolak untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam membentuk pemerintah yang demokratis di seluruh Semenanjung Korea, tetapi juga secara aktif berusaha mencegah terbentuknya pemerintah semacam itu.

Menyadari kejadian di wilayah bagian utara itu, Amerika Serikat kemudian juga memantapkan diri sebagai penguasa militer tunggal di bagian sela-

¹ John Albert White, *The Diplomacy of the Russo-Japanese War* (Princeton: Princeton University Press, 1908), hal. 116-117.

tan. Jadi keputusan untuk membentuk Perwalian Empat Negara (Inggeris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina) untuk Korea rupanya tidak dilaksanakan secara efektif, terutama karena mendapat tentangan dari Uni Soviet. Namun apa yang terjadi di Korea Selatan tidak berlangsung lama, karena Amerika Serikat segera melepaskan kekuasaannya di Korea Selatan setelah suatu pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis di bawah pengawasan PBB pada tanggal 10 Mei 1948 dan berhasil memilih 198 orang anggota Majelis Nasional yang pertama. Dua bulan kemudian Majelis Nasional itu berhasil membuat konstitusi dan pada tanggal 15 Agustus 1948 Syngman Rhee terpilih secara mayoritas sebagai Presiden Pertama Republik Korea.¹ Dengan terbentuknya suatu pemerintahan yang terpisah di kedua wilayah Korea itu, maka secara praktis garis paralel 38° menjadi batas permanen antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Sejak terbaginya Semenanjung Korea itu, Korea Selatan dan Korea Utara berkembang menjadi dua negara yang berbeda dalam sistem sosial, politik dan ekonomi. Kalau Korea Utara semakin jauh terikat kepada sistem sosialis-komunis, Korea Selatan sebaliknya semakin jauh mengembangkan sistem kapitalis.

PERKEMBANGAN DI KOREA UTARA

Korea Utara yang menamakan dirinya Republik Rakyat Demokrasi Korea (RRDK) hingga kini masih tetap dipimpin oleh Kim Il-sung (70 tahun). Tidak seperti di negara-negara kapitalis, di negara-negara komunis pada umumnya sekali seseorang berhasil berkuasa di negaranya, ia ingin tetap mempertahankan kekuasaannya itu selama mungkin dan banyak di antara mereka yang berkuasa seumur hidupnya. Di RRDK tampaknya Kim Il-sung juga cenderung ke arah itu. Bahkan sesuatu sedang terjadi di negara itu, yaitu Kim Il-sung sedang berusaha mendirikan suatu dinasti di jaman modern ini yang sebenarnya tidak berbeda dengan dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di semenanjung itu. Saat ini ia sedang mengorbitkan anaknya yang tertua, Kim Jong-il, untuk menggantikannya dan rupanya usahanya itu selangkah demi selangkah menunjukkan hasilnya. Misalnya pada Kongres Partai Pekerja Korea ke-6 yang berlangsung tanggal 10-14 Oktober 1980 Kim Jong-il berhasil dipilih dan ditempatkan sebagai anggota pertama pada Presidium Politbiro di dalam Komite Sentral Partai yang hanya beranggotakan lima orang itu, dan yang lebih penting adalah bahwa Kim Jong-il saat ini berhasil pula menempatkan dirinya pada urutan ketiga setelah bapaknya dan seorang jenderal yang sudah cukup umur di dalam Komisi Militer Partai.²

¹U.S. Department of State, *Korea: 1945-1948*, hal. 102-103.

Dengan dasar sosialisme-komunisme RRDK tahun demi tahun makin menjauhkan rakyatnya dari latar belakang sejarah Korea yang sejak lama mereka anut (pada umumnya rakyat Korea sangat kuat di dalam tradisi hidup yang dilatarbelakangi oleh paham konfusianisme dan budhisme), lebih-lebih setelah Kim Il-sung berhasil memantapkan kekuasaannya dengan membersihkan semua unsur kanan di wilayah Korea Utara. Pembangunan sosialisme memang berhasil meningkatkan standar hidup rakyat. Menurut perkiraan Bank Dunia, pendapatan per kapita berhasil ditingkatkan menjadi sekitar US\$ 1.000 pada tahun 1978 dan US\$ 1.310 tahun 1979.¹ Tetapi harga keberhasilan itu harus dibayar dengan mahal, yaitu dengan mengorbankan kebebasan individu dan hingga kini dengan tangan besi rezim Kim Il-sung mempertahankan RRDK terisolasi dari semua pengaruh dari dunia luar (kecuali Uni Soviet, RRC serta negara-negara komunis lainnya tentunya).

Ambisi RRDK meningkatkan pembangunan ekonomi tidak lain didorong oleh keberhasilan Republik Korea (Korea Selatan), yang sejak pelaksanaan Repelita Pertamanya (1962-1966) berhasil mengungguli RRDK (akan dibahas kemudian). Tetapi di samping keberhasilannya itu RRDK juga mengalami kesulitan-kesulitan terutama di dalam pembiayaan. Akibat ambisinya itu RRDK menanggung beban hutang yang tidak ringan. Pada tahun 1976 saja hutang RRDK sudah mencapai US\$ 2 milyar.² Sementara itu sumber kesulitan lain adalah terus meningkatnya anggaran militer dalam usahanya mengungguli Korea Selatan secara militer.

PERKEMBANGAN KOREA SELATAN

Sementara itu setelah Pemerintah Militer Amerika Serikat berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Korea Selatan, Syngman Rhee berkuasa sampai ia jatuh pada bulan April 1960 akibat demonstrasi mahasiswa yang menentangnya. Dalam pemilihan umum yang kedua, yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 1960 Partai Demokrat berhasil memenangkan suara di Dewan Nasional dan lima hari kemudian berhasil memilih bekas Wakil Presiden Chang Myon sebagai Perdana Menteri dan Yun Po-son sebagai Presiden. Pemerintah baru ini rupanya berbeda dengan pemerintah sebelumnya dalam beberapa hal. Pemerintah yang dipimpin oleh PM Chang itu lebih mengutamakan masalah pembangunan ekonomi dalam negeri daripada masalah penyatuan kembali. Tetapi pergolakan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat membuat situasi politik di Korea Selatan tidak stabil dan hanya sembilan bulan sesudah pemilihan itu Pemerintah PM Chang jatuh se-

¹Ibid., hal. 158.

²Ibid. hal. 159.

bagai korban suatu revolusi militer. Para pemimpin militer Korea Selatan segera membentuk "Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional" yang beranggotakan sekitar 20 pemimpin militer. Setelah Dewan itu berkuasa sekitar 30 bulan, dilaksanakan pemilihan umum yang ketiga (1963) di mana kemenangan diperoleh oleh Jenderal Park Chung-hee, yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan sampai ia tewas dalam usaha pembunuhan pada tanggal 26 Oktober 1979.

Pemerintah Park Chung-hee sebagaimana Pemerintah Chang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Tetapi kebijakan Presiden Park itu lebih jelas. Dalam banyak kesempatan ia selalu mengatakan bahwa untuk mencapai sasaran penyatuan kembali Korea, keadaan ekonomi dan sosial Korea Selatan harus lebih baik daripada Korea Utara.¹ Waktu duduk di Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional, Park memang termasuk salah satu perintis Repelita Pertama yang mulai dilaksanakan pada tahun 1962. Sasaran pertama Repelita Pertama itu adalah substitusi impor barang-barang seperti semen, penyulingan minyak, pupuk dan lain-lain dan pembangunan prasarana industri. Di dalam Pelita Kedua (1967-1972) Korea Selatan sudah meningkat kepada kebijakan ekspor terutama ekspor barang-barang industri ringan yang padat karya ke pasaran internasional dan sejak Pelita Ketiga dan seterusnya Korea Selatan memusatkan perhatiannya pada industri berat dan kimia. Dengan Pelita-pelita itu Pemerintah Korea Selatan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,4% per tahunnya, dan pada periode tahun 1961 sampai 1980 meningkatkan pendapatan per kapita dari US\$ 83 tahun 1961 menjadi US\$ 1.506 tahun 1980.² Perbedaan perkembangan di Korea Utara dan Korea Selatan itu rupanya sangat mempengaruhi usaha-usaha penyatuan kembali yang dilakukan oleh masing-masing pihak, di samping faktor-faktor lain, terutama faktor luar, yang juga memegang peranan penting dalam masalah penyatuan kembali Semenanjung Korea itu.

USAHA-USAHA PENYATUAN KEMBALI

Konflik dan ketegangan yang sedang terjadi di Semenanjung Korea itu tidak bisa hanya dilihat sebagai konflik dan ketegangan intra-bangsa Korea saja, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Misalnya saja faktor kepentingan negara-negara besar seperti tersebut di atas. Sejak awal pecahnya bangsa Korea itu menjadi dua negara, mereka sadar akan perlunya penyatuan kembali. Tetapi usaha-usaha yang mereka lakukan

¹Hak Joon Kim, *op. cit.*, hal. 197-198.

²KDI (Korea Development Institute), *The Fifth Five-year Economic and Social Development*

ke arah itu mengalami kegagalan, terutama karena masing-masing pihak semakin jauh tertarik ke dalam sistem aliansi yang terbentuk pada waktu itu dan negara-negara besar pendukung mereka rupanya tidak menghendaki adanya penyatuan atas dasar negosiasi dan kompromi, tetapi lebih suka kalau pihak yang didukungnya berhasil mengalahkan pihak lain. Hal itu tampak pada usaha penyatuan kembali wilayah yang terpisah itu secara militer pada tahun 1950. Invasi militer yang dilancarkan oleh pihak Korea Utara pada bulan Juni 1950, di samping untuk memenuhi angan-angan Cina dan Uni Soviet sebagai pendukung utamanya, dimaksudkan juga untuk menyatukan Korea di bawah rezim komunis. Demikian pula pihak Korea Selatan, setelah berhasil mendesak ke luar kaum penyerbu dengan bantuan pasukan Amerika Serikat dan PBB, ingin merebut kembali wilayah Korea Utara dari tangan kaum komunis dan menyatukan kembali wilayah itu di bawah rezim demokratis yang berkuasa di Korea Selatan. Namun karena pihak lawan didukung oleh satu atau lebih banyak negara besar, Korea Utara maupun Korea Selatan tidak dapat berbuat banyak dan gagallah usaha masing-masing menyatukan kembali Korea, dan keputusan yang telah disepakati oleh Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina untuk mengembalikan status quo sebelum perang terpaksa diterima.

Sejak berakhirnya Perang Korea itu sulit kiranya penyatuan kembali dilaksanakan tanpa melibatkan ketiga negara besar itu. Sebaliknya perang itu justru makin memantapkan pengaruh Amerika Serikat di Korea Selatan. Karena kecurigaannya terhadap Korea Utara, Pemerintah Korea Selatan mengadakan ikatan pertahanan dengan Amerika Serikat, yang sebelum perang telah sempat mengakhiri campur tangannya di Korea Selatan dan menarik mundur seluruh pasukannya dari wilayah itu, dan sejak saat itu pula Korea Selatan menjadi salah satu bagian dari garis pertahanan global Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman dari Uni Soviet.

Interaksi di antara ketiga negara besar selama ini rupanya sangat mempengaruhi usaha-usaha penyatuan kembali. Misalnya pendekatan Amerika Serikat ke Cina sejak awal tahun 1970-an sangat mempengaruhi perubahan sikap Korea Selatan dan Utara. Pada tahun 1972 keduanya sepakat untuk meredakan ketegangan dengan menandatangani suatu komunikasi bersama pada bulan Juli 1972 sebagai landasan perundingan-perundingan antara mereka dengan sasaran akhir penyatuan kembali secara damai. Namun usaha itu dihentikan secara sepihak oleh Korea Utara pada tahun 1973 karena di Korea Selatan diberlakukan keadaan darurat, dan sejak itu pihak Korea Utara justru lebih suka mengadakan perundingan langsung dengan Amerika Serikat. Namun pihak Amerika Serikat tidak mau mengadakan perundingan seperti itu tanpa ikut sertanya Korea Selatan.

Makin baiknya hubungan Amerika Serikat dengan Cina pada akhir dasawarsa 1970-an sampai awal tahun 1980-an rupanya kembali memengaruhi

kap Korea Utara. Pada Kongres Partai Pekerja Korea ke-6 bulan Oktober 1980, misalnya, Kim Il-sung mengajukan suatu usul baru sepuluh pasal yang isinya sebagai berikut: (1) kesetiaan kepada kemerdekaan, netralitas, non-blok, penentangan untuk menjadikan negara sebagai satelit negara lain; (2) demokrasi di seluruh wilayah Korea dan usaha ke arah penyatuan nasional; (3) kerja sama ekonomi dan tukar-menukar pengalaman pembangunan ekonomi seperti misalnya usaha gabungan dan pasaran bersama; (4) pertukaran dan kerja sama yang aktif di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pendidikan untuk menjamin tingkat kemajuan yang seragam; (5) membuka kembali hubungan telepon, pos dan transportasi darat, laut dan udara; (6) terus mengusahakan kestabilan dan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat; (7) mengakhiri konfrontasi militer dan membentuk angkatan bersenjata nasional gabungan; (8) perlindungan hak-hak dan kepentingan orang-orang Korea di luar negeri dan hak mereka untuk kembali dan hidup di mana pun yang mereka sukai di wilayah Korea; (9) perlakuan yang tepat bagi setiap hubungan luar negeri yang telah dijalin baik oleh Korea Utara maupun Selatan dengan disesuaikan dengan usaha penyatuan kembali dan koordinasi bagi setiap aktivitas luar negeri dengan memberikan konsesi pada hubungan ekonomi yang berlaku di bagian selatan; (10) perwakilan diplomatik hanya dilakukan oleh pemerintah konfederasi sebagai suatu negara Korea yang disatukan; kebijakan yang netral, non-blok dan bersahabat dengan semua negara; tidak menjalankan kebijakan yang menjurus pada ancaman agresi terhadap negara lain; wilayah bebas nuklir dan bebas dari pasukan asing.¹

Usul baru Korea Utara itu rupanya masih ditolak oleh Korea Selatan karena secara tidak langsung menghendaki pemutusan hubungan dengan Amerika Serikat khususnya di bidang pertahanan. Korea Selatan menganggap Korea Utara masih bersikap mendua. Di satu pihak Korea Utara menghendaki adanya perundingan secara damai tetapi di lain pihak ia tetap tidak mau melepaskan sikap yang revolusioner yaitu keinginannya untuk menyatukan kembali Korea secara militer dengan tujuan akhir satu negara Korea yang komunis. Itulah sebabnya Korea Selatan tidak mau melepaskan diri dari ikatan pertahanan dengan Amerika Serikat. Sebaliknya Korea Selatan mengajukan usul tandangan. Pada tanggal 12 Januari 1981 Presiden Chun Doo-hwan mengusulkan dilakukannya saling berkunjung di antara pemimpin-pemimpin tinggi kedua belah pihak, dan pada tanggal 5 Juni 1981 ia mengatakan kepada sekitar 8.000 anggota Dewan Penasihat Urusan Kebijakan Penyatuan Kembali Korea bahwa pertemuan pemimpin tertinggi kedua belah pihak itu perlu dibarengi dengan dibukanya kembali hubungan antara kedua rakyat yang terpisah dan dirintisnya pertukaran di bidang pos, kebudayaan dan olahraga. Usul ini di-

¹Gavan McCormack, "The Reunification of Korea: Problems and Prospects," *Pacific Af-*

pertegas lagi dalam pesan tahun barunya tanggal 22 Januari 1982, ketika ia mengatakan bahwa perlu dibentuk suatu "Konferensi Konsultasi untuk Reunifikasi Nasional" dalam rangka mempersiapkan suatu konstitusi baru untuk suatu negara Korea yang dipersatukan dengan dasar demokrasi, kebebasan dan kemakmuran individu. Dan untuk membentuk suatu pemerintah yang dapat mewakili seluruh rakyat Korea perlu diadakan suatu pemilihan umum yang bebas.

Usul pihak Korea Selatan itu rupanya juga ditolak oleh Korea Utara, bukan karena Korea Utara tidak setuju dengan isi usul itu, melainkan karena ia tidak mau berhubungan dengan Pemerintah Chun Doo-hwan. Ada beberapa alasan yang diajukan. *Pertama*, Korea Utara menganggap bahwa Pemerintah Chun Doo-hwan bukan pemerintah yang demokratis. *Kedua*, kebijakan rezim Seoul yang anti-komunis itu menurut Korea Utara sangat tidak menguntungkan usaha penyatuan kembali. *Ketiga*, Korea Utara tetap menuntut penarikan mundur seluruh pasukan Amerika Serikat dari Semenanjung Korea sebagai syarat mutlak untuk memulai perundingan.

Pemerintah Chun Doo-hwan memang bukan hasil pemilihan yang demokratis. Ketika rezim Chun Doo-hwan tampil situasi politik di Korea Selatan tidak memungkinkan diadakannya pemilihan umum yang demokratis untuk memilih seorang presiden baru. Sebaliknya Pemerintah Kim Il-sung sendiri tidak lain adalah pemerintah satu partai yang sangat otoriter. Bahkan Kim sejak lama, dengan menggunakan kesempatan karena kekuasaannya yang otoriter itu, berusaha mendirikan suatu dinasti. Kiranya hal semacam itu sulit disebut demokrasi. Sementara itu kebijakan anti-komunis Korea Selatan sudah dimulai sejak awal berdirinya dan sikap ini semakin mantap dengan keberhasilannya meningkatkan taraf hidup rakyat secara drastis itu dan dengan semakin terikatnya dalam sistem aliansi.

Sedangkan penarikan mundur seluruh pasukan Amerika Serikat berikut persenjataan nuklirnya yang dituntut oleh Korea Utara kiranya sulit untuk dilaksanakan. Dua faktor penting sedikitnya mempengaruhi keberatan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat itu. *Pertama*, faktor kecurigaan terhadap rezim Korea Utara yang tetap memperjuangkan penyatuan kembali secara militer. Faktor inilah yang menyebabkan Korea Selatan enggan melepaskan keterikatannya kepada Amerika Serikat. Dalam pesan Natalnya kepada para serdadu Amerika Serikat yang sedang bertugas di Korea Selatan, Chun Doo-hwan antara lain mengatakan bahwa kehadiran mereka itu penting untuk mempertahankan perdamaian dan masyarakat yang bebas.¹ *Kedua*, mengingat Korea itu sangat strategis untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet, maka Amerika Serikat tetap akan mempertahankan kehadirannya di sana. Di samping itu rupanya Amerika Serikat sendiri sudah cukup paham akan taktik

¹The Korea Herald, tanggal 25 Desember 1982.

Korea Utara dan sekutu-sekutunya. Hal itu dapat dilihat dari pengalaman penarikan mundur pasukan Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1949. Pada waktu itu Amerika Serikat sungguh mengharapkan adanya penyatuan Semenanjung Korea yang dilakukan oleh bangsa Korea sendiri tanpa campur tangan negara-negara lain. Oleh karenanya Amerika Serikat bersedia mengakhiri keterlibatannya di semenanjung itu dan menarik mundur seluruh pasukannya pada bulan Juni 1949. Tetapi kejadian itu oleh Korea Utara justru dianggap suatu kesempatan yang baik untuk melaksanakan penyatuan kembali secara militer, dan selama 12 bulan Korea Utara yang dibantu secara aktif oleh Cina dan Uni Soviet mempersiapkan invasi militer ke Korea Selatan.

PENUTUP

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa penyatuan kembali Korea belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini karena beberapa alasan. *Pertama*, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak tampaknya bukan dimaksud untuk penyatuan Korea, melainkan sekedar untuk meredakan ketegangan di semenanjung itu. *Kedua*, konflik yang terjadi di Semenanjung Korea itu bukan hanya konflik intra-bangsa Korea, melainkan bagian dari konflik global antara kubu komunis dan kubu dunia bebas yang masing-masing dipimpin oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi penyatuan kembali Korea itu hanya dimungkinkan bila terjadi perubahan sikap permusuhan di antara negara-negara besar yang terlibat di dalam persengketaan global.

Namun perkembangan tahun 1980-an ini menunjukkan bahwa persaingan antara kedua superpower terus berlanjut. Kesadaran Jepang untuk meningkatkan pertahanan dan makin membaiknya hubungan negara itu dengan Korea Selatan akan menciptakan suatu perimbangan baru, khususnya bila pendekatan Moskwa-Beijing sekarang ini berhasil mencapai sasarannya berupa dijalinnya kembali hubungan erat seperti terlihat pada tahun 1950-an. Bila hal itu terjadi, maka perimbangan yang akan ada di satu pihak Korea Utara, Cina dan Uni Soviet dan di lain pihak Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat.

Sebagai subsistem dalam sistem baru yang terbentuk itu Korea Selatan dan Korea Utara terikat kepada aliansinya masing-masing, sehingga kebijakan apa pun akan dijalankan oleh masing-masing pihak harus diselaraskan dengan kebijakan sekutunya. Perkembangan itu pasti akan mempersulit usaha penyatuan kembali. Jadi rupanya letak Semenanjung Korea yang strategis itu justru tidak menguntungkan bangsa yang menempatinya, tetapi merupakan salah satu faktor perpecahannya.